

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUNJANGAN KHUSUS GURU DAERAH TERPENCIL DI DESA BATURUBE KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI

Hetrisia Fatri Taruangi

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako Palu)

Abstract

The purpose of this study is to determine the Implementation of teacher distinctive grant policy in the remote area of Baturube Village north Bungku Sub-district Morowali, through the implementation of the theory of Edward III which includes communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The research method used is descriptive qualitative helped by six informants where they were selected by way of purposive. The method of collecting data was through observation, interviews and documentation, with the data analysis techniques include data reduction, data display, drawing conclusions and verification of data. The result of the research explain that the implementation of teacher distinctive grant policy in the remote area of Baturube village North Bungku Sub-district Morowali not going well yet, this can be seen from the implementation obstacle in aspect of communication and resource such as lack of socialization carried, the inadequata of human resource capacity, lack of facilities, supporting infrastructure, and limited funding, as of disposition aspects although the implementers respond and support the implementation of this program however in practice there are certain weaknesses that need to be anticipated and addressed wisely, and from the aspect of bureaucratic structure also shows that even though this policy has been equipped with the rules, but the implementation is not going well due to lack of understanding and knowing executing tasks to be done.

Keywords: *Policy Implementation, Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure*

Peningkatan kualitas suatu bangsa dapat dilakukan melalui sektor pendidikan sedangkan peningkatan kualitas pendidikan salah satunya dapat dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan guru. Dalam dunia pendidikan keberadaan, peran dan fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat urgen, karena komponen pendidikan yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan rencana strategis tersebut adalah guru.

Guru memiliki peranan yang strategis dan merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan kelembagaan sekolah, karena guru adalah pengelola Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bagi para siswanya. Oleh karena itu, dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan, tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi guru itu

sendiri, termasuk meningkatkan kesejahteraannya.

Kesejahteraan guru menjadi jantungnya pelayanan pendidikan, karena dengan sistem insentif yang wajar dan berkeadilan dapat diharapkan suatu komitmen guru untuk memberikan pelayan optimal dan terbaik bagi masyarakat. Tingkat kesejahteraan merupakan penentu yang amat penting bagi kinerja guru dalam menjalankan tugasnya.

Dengan dikeluarkannya UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan angin segar bagi para guru. Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru lebih nyata lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen,

serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Sasaran dari program pelaksanaan tunjangan ini adalah seluruh guru PNS dan Non PNS sebanyak 2.304.613 guru binaan Depdiknas pada pendidikan dasar dan menengah baik sekolah negeri maupun swasta yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan atau persyaratan yang ditetapkan untuk setiap jenis tunjangan.

Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional dalam hal ini Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) telah merancang program Penyelenggaraan Tunjangan Khusus Tahun 2009 sebagai pelaksanaan amanat UU No. 14 Tahun 2005 pasal 18 ayat 1 yang menyatakan Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang bertugas di daerah khusus. Terkait dengan kriteria daerah-daerah khusus yang dimaksud adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

Tunjangan khusus guru daerah terpencil menurut Peraturan Pemerintah RI No 41 Tahun 2009 adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus sehingga melalui program pemerintah tersebut diharapkan para guru tidak lagi menolak dan betah untuk ditempatkan dan tinggal di daerah terpencil karena kesejahteraan mereka dapat terjamin. Tunjangan bantuan kesejahteraan guru daerah terpencil untuk guru PNS dihitung berdasarkan gaji pokok.

Dari hasil pengamatan peneliti terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil, di

Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali yang merupakan salah satu daerah terpencil, ternyata ditemukan berbagai masalah dalam pelaksanaannya misalnya komunikasi yang kurang baik, sumberdaya yang kurang memadai, pelaksana yang kurang memahami aturan dalam pelaksanaan program ini serta kenyataan bahwa tidak semua guru yang bertugas di desa itu menerima tunjangan khusus guru daerah terpencil padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang kebijakan ini menyatakan bahwa, setiap guru baik PNS maupun Non PNS yang bertugas di daerah terpencil dan memenuhi kriteria yang ditetapkan berhak memperoleh tunjangan khusus guru daerah terpencil.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Bungku Utara menunjukkan bahwa penerima tunjangan khusus guru daerah terpencil tahun 2012 di Desa Baturube tercatat dari 51 orang guru PNS yang menerima tunjangan tersebut hanya 17 orang dengan rincian sebagai berikut: 1 orang guru SD, 6 orang Guru SMP dan 10 orang guru SMA. Sedangkan bagi guru non PNS belum ada yang dinyatakan sebagai penerima tunjangan tersebut. Hal ini menimbulkan kecemburuan bagi guru yang tidak menerima tunjangan khusus tersebut sehingga kenyataan demikian mempengaruhi semangat para guru dalam proses belajar mengajar di sekolah. Pemberian tunjangan khusus pada guru juga mengalami keterlambatan menyebabkan para guru penerima mengalami masalah baru untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian terkait dengan implementasi tunjangan khusus guru daerah terpencil di Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali adalah pelaksanaan program kebijakan tentang tunjangan khusus guru daerah terpencil yang belum terlaksana sesuai apa yang diharapkan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil Di Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali.”

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana implementasi kebijakan tunjangan khusus guru daerah terpencil di Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali?”. Untuk membahas fokus permasalahan, peneliti memilih menggunakan pendekatan model implementasi Edward III yang menyatakan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat aspek yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*Publik Policy Proses*), sekaligus studi yang sangat krusial.

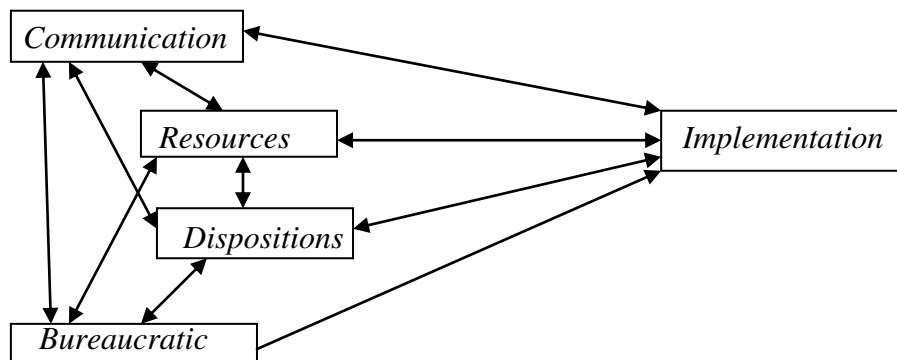
Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012: 149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap implementasi terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut, dirumuskan, serta apa yang timbul dari program kebijakan itu.

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012: 148) mengatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-

undang ditetapkan dan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi dalam hal ini menunjuk pada sebuah kegiatan yang mengikuti pernyataan tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Selanjutnya George Edward III (1980: 9-10) menjelaskan bahwa studi implementasi kebijakan adalah hal yang sangat krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Edward III berpandangan bahwa dalam mengkaji implementasi kebijakan, terlebih dahulu perlu diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: “*What are the preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?*” Maksudnya, Apa prasyarat untuk keberhasilan implementasi kebijakan? Apa hambatan utama keberhasilan implementasi kebijakan? Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan penting ini dengan menguraikan empat aspek krusial dalam implementasi kebijakan. Aspek-aspek tersebut adalah *communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure* (Edwards III, 1980: 10). Aspek-aspek tersebut berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan.

Bila ditampilkan dalam bentuk gambar bagaimana keterkaitan antara faktor-faktor atau aspek-aspek yang saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap implementasi kebijakan, maka dapat terlihat sebagai berikut:

Gambar 4. Model Implementasi George C. Edward III

Sumber: George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (1980 : 148).

Dari gambar tersebut nampak bahwa faktor-faktor komunikasi, sumberdaya, sikap implementor, dan struktur birokrasi dapat secara langsung mempengaruhi implementasi kebijakan.

Untuk memperjelas masing-masing aspek tersebut, maka diuraikan sebagai berikut:

1) Komunikasi.

Dimensi komunikasi menunjukkan peranan sebagai acuan pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang mereka kerjakan dan siapa kelompok sasaran kebijakan tersebut. Berarti komunikasi menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara implementor dengan para kelompok sasaran kebijakan. Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya penyimpangan atas program/kebijakan. Dengan demikian komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten.

Secara umum Edward III dalam Winarno (2002: 126-127) membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu:

(1) Transmisi

Dimana sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan

suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana tampaknya. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan, hal ini terjadi karena komunikasi implementasi tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi dimana memiliki struktur yang ketat dan kaku, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

(2) Konsistensi

Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung secara efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas sehingga memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan dan sering berubah maka akan menyulitkan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

(3) Kejelasan

Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana

yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan tetapi juga harus jelas (*clear*) dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Kejelasan informasi yang disampaikan ini akan meminimalisir kemungkinan terjadinya distorsi atau penyimpangan informasi dari apa yang seharusnya atau dikehendaki oleh pemberi informasi.

2) Sumberdaya.

Sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud menurut Edward III dalam Winarno (2012: 181-193) mencakup :

(1) Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, tidak memadai ataupun tidak kompeten di bidangnya.

(2) Informasi

Informasi ini harus relevan dan memadai tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Dalam implementasi

kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: Pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementator harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementator harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

(3) Wewenang

Hal lain yang harus ada dalam sumber daya adalah kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.

(4) Fasilitas

Fasilitas atau sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan yang meliputi dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, gedung, tanah, sarana dan prasarana yang kesemuanya akan memberikan dukungan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Dalam konteks yang lebih luas Tachjan dalam Rusli (2013: 103) menjelaskan bahwa:

“Sumberdaya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumberdaya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau

kegunaan potensial dalam transformasinya kedalam output. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi.”

3) Disposisi.

Disposisi/sikap pelaksana adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor.

Menurut Edward III dalam Winarno (2012: 197) mengemukakan “kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Sikap dari pelaksana akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki sikap merespon dan mendukung maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak merespon dan mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Dalam kaitannya dengan sikap pelaksana kebijakan, hal yang diperlukan adalah adanya dukungan pelaksana kebijakan terhadap kebijakan itu sendiri. Selain itu menurut Edward III, menyarankan salah satu teknik untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif-insentif.

4) Struktur Birokrasi.

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi merupakan faktor yang sangat mendasar dalam mengkaji implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Menurut Edward III dalam Winarno (2002: 151) dalam uraiannya menyangkut struktur birokrasi pada hubungannya dengan implementasi kebijakan menyatakan ada dua aspek atau karakteristik utama yakni, pertama adanya prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya atau *Standart Operating Procedure* (SOP). SOP merupakan tata cara atau tahapan yang dilakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Karakteristik yang kedua fragmentasi atau pola hubungan kerja antar bagian dalam organisasi. Dimensi fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah) dapat mengakibatkan gagalnya implementasi, karena fragmentasi birokrasi akan membatasi kemampuan para pejabat untuk mengkoordinasikan semua sumberdaya yang relevan dalam suatu yurisdiksi tertentu yang berakibat lebih lanjut adalah ketidakefisien dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat dalam organisasi yang kompleks serta tersebar luas dan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan. Tanpa SOP, maka setiap pelaksana kebijakan akan melakukan tindakan sesuai persepsinya sehingga tidak terarah pada upaya pencapaian tujuan kebijakan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Dan informan sebanyak 6 (enam) orang yang dipilih berdasarkan *purposive*. Penelitian dilakukan di Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali sejak 1 Desember 2013 sampai 28 Februari 2014, dengan pertimbangan bahwa Desa Baturube terdapat guru-guru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas sebagai

penerima kebijakan tunjangan khusus guru daerah terpencil yang dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan tujuan dan harapan dari program kebijakan tunjangan khusus guru daerah terpencil. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian ini, data diperoleh dari 2 sumber yaitu: (a) data primer adalah hasil wawancara dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian dengan jenis pertanyaan yang mengarah pada 4 (empat) aspek model implementasi kebijakan Edward III dan hasil observasi, (b) data sekunder berasal dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Daerah Kecamatan Bungku Utara, Kantor Desa Baturube dan buku-buku literatur maupun internet dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, *display data* (penyajian data) serta mengambil kesimpulan dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Gambaran Umum Pelaksanaan Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil di Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali bahwa Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru.

Namun fakta yang terjadi disamping kebijakan yang telah dibuat adalah pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Khususnya di Desa Baturube yang merupakan daerah terpencil, berdasarkan data tahun 2012 yang diperoleh dari Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Daerah Kecamatan

Bungku menunjukkan bahwa tidak semua guru yang berada di desa tersebut menerima tunjangan khusus guru daerah terpencil. Hal ini terbukti bahwa dari 51 orang guru PNS (SD, SMP dan SMA) yang menerima tunjangan khusus guru daerah terpencil hanya 17 orang sedangkan bagi guru non PNS tidak ada yang menerima tunjangan tersebut dan untuk tahun 2013 jumlah guru penerima tunjangan khusus ini berkurang menjadi 11 orang guru. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program atau kebijakan tunjangan khusus guru daerah terpencil di Desa Baturube belum terlaksana dengan baik sebagaimana harapan dari pemerintah.

Pembahasan

Aspek Komunikasi

Aspek komunikasi dalam implementasi tunjangan khusus guru daerah terpencil di Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali, dalam hal sosialisasi program perlu ditingkatkan, karena hasil wawancara peneliti dengan 6 orang informan bahwa aspek komunikasi melalui pengenalan, pengetahuan serta sosialisasi yang baik tentang program tunjangan khusus guru daerah terpencil di Desa Baturube dapat dikatakan belum dilakukan dengan baik dan benar.

Dari hasil pengamatan peneliti dilapangan terlihat bahwa bukan hanya kelompok sasaran saja yang tidak mengerti dan memahami program ini secara baik dan benar bahkan implementor pun tidak mengetahui dan mengerti secara baik dan benar tentang program ini, akibatnya program ini tidak diketahui secara merata oleh mereka yang seharusnya berhak menerima.

Kenyataan seperti ini sebenarnya dapat terjawab jika ada sosialisasi yang baik kepada pelaksana maupun kelompok sasaran, seperti yang dikatakan oleh Edward III dalam Budiman Rusli (2013: 101) bahwa:

“Syarat pertama agar pelaksanaan suatu kebijakan menjadi efektif, kebijakan ini harus disampaikan/diketahui oleh orang-

orang yang disertai tanggung jawab untuk melaksanakannya dengan jelas, tentu saja dalam hal ini diperlukan komunikasi yang akurat dan dilaksanakan dengan tepat oleh pelaksana.”

Selama hal ini masih diabaikan dan dikesampingkan maka jangan pernah berharap bahwa suatu program kebijakan akan berjalan dengan terarah, tertib, teratur, dan memenuhi rasa keadilan berdasarkan harapan pemerintah.

Sumberdaya

Aspek sumberdaya dalam implementasi kebijakan tunjangan khusus guru daerah terpencil di Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali, ternyata belum memiliki sumberdaya yang memadai. Tenaga yang kurang diberdayakan dan kurangnya fasilitas pendukung yang tersedia serta terbatasnya dana menyebabkan program ini sepertinya berjalan apa adanya tanpa mempertimbangkan masalah-masalah yang dapat ditimbulkan.

Peneliti berpendapat bahwa ketersediaan sumberdaya baik berupa sumberdaya manusia maupun fasilitas pendukung dalam hal ini sarana prasarana dan anggaran dalam pelaksanaan implementasi tunjangan khusus guru daerah terpencil di Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali sangat penting. Karena keberhasilan kebijakan tergantung pada implementor dan kelompok sasaran. Hal ini berarti sebaik apapun kebijakan yang akan diimplementasikan, apabila tidak didukung oleh implementor yang memiliki kemampuan dan fasilitas pendukung berupa sarana prasarana dan dana yang memadai maka kinerja kebijakan tidak akan berjalan secara efektif dan efisien.

Disposisi

Aspek disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan tunjangan khusus guru daerah terpencil di Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali, menunjukkan bahwa pelaksana merespon

dan mendukung pelaksanaan program ini, segala upaya mereka lakukan untuk menjalankan program ini. Meskipun masih terdapat kelemahan-kelemahan dari sikap pelaksana dalam menjalankan program ini, seperti sikap yang kurang terbuka dalam penyampaian program ini kepada semua kelompok sasaran.

Peneliti berpendapat bahwa sikap pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan tunjangan khusus guru daerah terpencil di Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali, mereka mendukung dan merespon kebijakan ini, untuk itu mereka juga perlu diberikan insentif agar mereka lebih bersemangat menjalankan program ini demi memperjuangkan kesejahteraan para guru daerah terpencil khususnya di Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali.

Struktur Birokrasi

Aspek struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan tunjangan khusus guru daerah terpencil di Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali, struktur birokrasi dalam pelaksanaan tunjangan khusus guru daerah terpencil di Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali dilihat dari aspek struktur birokrasi khususnya pada SOP dan fragmentasi, belum berjalan secara baik karena walaupun program ini dilengkapi dengan aturan-aturan/SOP, namun dalam pelaksanaannya pelaksana kurang memahami dan mengetahui tentang tugas dan fungsi yang harus dilakukan sehingga dalam melaksanakan program ini pelaksana hanya melaksanakan sesuai dengan persepsinya sendiri bukan berdasarkan aturan-aturan yang sebenarnya. Hal ini mengakibatkan kurang efektifnya implementasi kebijakan.

Peneliti berpendapat bahwa implementasi kebijakan tunjangan khusus guru daerah terpencil akan tercapai dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan apabila para implementor kebijakan

memahami dengan jelas tugas dan fungsinya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil di Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali, yang dilihat dari 4 aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi menunjukkan hasil bahwa belum terlaksana dengan baik karena dari empat aspek yang diteliti masih terdapat aspek yang belum berjalan dengan baik seperti komunikasi yang terkait dengan sosialisasi yang kurang dilaksanakan, kemampuan sumberdaya manusia yang kurang memadai, fasilitas pendukung seperti sarana prasarana serta dana yang terbatas dan aspek struktur birokrasi yang terkait dengan kurangnya pemahaman pelaksana kebijakan tentang tugas dan fungsi yang harus dilakukan. Sedangkan dari aspek disposisi dapat dikatakan cukup baik, karena adanya dukungan pelaksana.

Rekomendasi

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan antara lain, yaitu:

- (1) Kiranya Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali perlu mengoptimalkan sosialisasi baik kepada pelaksana maupun kepada kelompok sasaran agar pelaksanaan kebijakan tunjangan khusus guru daerah terpencil di Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara dapat terlaksana dengan baik.
- (2) Kiranya pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh sumberdaya yang memadai yakni staf yang memiliki kemampuan dan mengerti tugasnya serta fasilitas pendukung seperti sarana prasarana dan anggaran yang cukup.
- (3) Kiranya dalam pelaksanaan program ini para pelaksana diberikan insentif sebagai penghargaan atas komitmen mereka

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

- (4) Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali kiranya mengevaluasi secara menyeluruh implementasi kebijakan ini agar mengetahui kelemahan-kelemahan dari kebijakan tersebut, sehingga dapat melakukan perbaikan-perbaikan kedepan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. Hasan Muhammad, M.Si., selaku ketua pembimbing dan Bapak Nawawi Natsir, M.Si., selaku anggota pembimbing yang telah memberikan arahan bimbingan, petunjuk, saran dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian penelitian dan pembuatan tesis serta jurnal ini.

Penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kiranya beliau berdua diberikan limpahan berkat, rahmat dan hidaya atas segala amal ibadahnya membimbing penelitian dan penyelesaian artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Press*. Washington DC.
- Moleong, Lexi. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- , 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus (Edisi dan Revisi Terbaru)*. Yogyakarta: Penerbit CAPS.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan

Khusus Guru dan Dosen, serta
Tunjangan Kehormatan Profesor.

Undang-Undang RI No 14 Tahun 2005
Tentang Guru dan Dosen.